PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**
LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIT KERJA : **UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RETNO PURWANINGSIH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **651281**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.570.000.000**

1. Tanah Seluas 91 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/125 m2 di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
4. Tanah Seluas 133 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 336.000.000**

1. MOTOR, HONDA K1H02N14LOA/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA NC1104A1CA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DPNONABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
4. MOTOR, HONDA NF125TRM/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO RS/ MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	124.402.067
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.030.402.067
III.	HUTANG	Rp.	67.432.050
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.962.970.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.